

PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI PENEGAK HUKUM PASCA REPOSISI :
Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat

Oleh
Nellida Rumapea¹, Muchsan², Enny Nurbaningsih³

INTISARI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pasca reposisi ada pergeseran lingkup pengertian tugas POLRI dari penegakan hukum yang sempit ke arah yang lebih luas. Dalam rangka pelaksanaan sistem peradilan pidana lingkup tugas POLRI sebagai penegak hukum merupakan lingkup yang sempit, sedangkan dalam peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat adalah dalam rangka terwujudnya penegakan hukum arti luas. Dengan demikian input (nilai-nilai) dasar pelaksanaan tugas POLRI adalah pelindung, pengayom dan pelayanan, sedangkan output (hasilnya) adalah tegaknya hukum, dan output (dampaknya) adalah kondisi tertib dan meningkatnya derajat rasa aman dalam masyarakat.
2. POLRI yang bercorak *civilian police* sampai saat ini belum terwujud secara maksimal. Selain transformasi kultural yang belum menyentuh level bawah juga strategi mengimplementasikan prinsip demokratisasi yang tercermin dalam organisasi baru POLRI belum dilaksanakan secara konsisten. Dalam tugas sebagai penyidik, terjadi perluasan kewenangan menyidik tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI, tetapi tidak diikuti dengan peraturan untuk mengoperasionalkannya. Demikian pula peraturan yang menjembatani sekaligus membatasi interaksi politik dengan POLRI belum ditertibkan sehingga POLRI rentan terhadap intervensi politik kekuasaan.

Berdasarkan penelitian ini disarankan agar segera ditertibkan peraturan yang mengoperasionalkan perluasan kewenangan POLRI, rekonstruksi hukum pidana, dilaksanakan sosialisasi strategi pemolisian demokratis, dan dibentuk Komisi Kepolisian Nasional.

Kata Kunci: *Peranan POLRI, Pengak Hukum.*

¹ WAKAPOLRES Cilacap, Jawa Tengah

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

³ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

THE ROLES OF INDONESIAN POLICE FORCE AS THE UPHOLDER OF THE LAW POST-REPOSITIONING

Nellida Rumapea¹, Muchsan², Enny Nurbaningsih³

ABSTRACT

The results of the research show that:

1. After the repositioning, the tasks of POLRI shift from a narrower, into broader scope. For the implementation of criminal judicial system, the task of POLRI as law upholder is of a narrow scope, while the tasks as protector, patron, and servant of society are of broader scope. Therefore, the basic input (values) for task implementation is to protect, to guard, and to serve the society, and the output is well-enforced law (outcome) and orderly condition as well as better feeling of security in society (impact).
2. The POLRI which is characterized as civilian police is not yet optimum. Not only has cultural transformation not touched grass root level, but also the strategy for implementation of democracy principles to be reflected in a new organization of POLRI has not been implemented consistently. The task as investigator show extended authority for initiating investigation and examination on all crimes previously handled by TNI, but it is not followed up with regulations for operation. Similarly, the regulation to bridge and limit political interaction with POLRI has not been set with clear guidelines, leaving POLRI remain vulnerable to political intervention.

The results of this research propose the endorsement of a set of regulations that shall give wider authority to POLRI, criminal law reconstruction, socialization of democratic police strategy, and establishment of National Police Commission.

Keywords: roles of POLRI – upholder of law

¹ Waka Polres, Cilacap, POLDA Jawa Tengah

² Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

³ Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta